

Liberalisasi Visa dan Kontrol Imigrasi: Studi Komparatif Keberhasilan Pariwisata Jepang dan Tantangan Indonesia

Muhammad Rahmad¹, Elyn Hastriana²

^{1,2}Institut Pariwisata Trisakti

¹muhammadrahmad@iptrisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keberhasilan Jepang dalam mengelola 36 juta wisatawan asing pada tahun 2024 dengan tingkat pelanggaran imigrasi hanya 0,2%, serta implikasinya bagi pengembangan kebijakan pariwisata Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif berbasis data sekunder dari Japan Immigration Services Agency, World Travel and Tourism Council, dan berbagai jurnal bereputasi, studi ini mengidentifikasi empat faktor kunci keberhasilan Jepang: sistem sanksi yang terukur, penegakan hukum konsisten, integrasi teknologi biometrik, dan budaya kepatuhan. Kontribusi ekonomi pariwisata Jepang mencapai 44,6 triliun yen terhadap PDB dengan rasio manfaat-biaya 743:1 dibandingkan penanganan pelanggaran imigrasi. Sementara itu, Indonesia pasca-liberalisasi visa 2016 justru mengalami peningkatan pelanggaran imigrasi sebesar 176% dalam dua tahun. Temuan ini menegaskan bahwa liberalisasi visa tanpa sistem pendukung yang memadai bersifat kontraproduktif, sebagaimana dibuktikan dalam berbagai studi terkini. Penelitian ini merekomendasikan implementasi "pintu yang lebih cerdas" melalui integrasi teknologi, sistem biometrik, dan konsistensi penegakan hukum sebagai syarat keberhasilan liberalisasi visa di Indonesia.

Kata Kunci: pariwisata, liberalisasi visa, kontrol imigrasi, multiplier effect, Jepang, Indonesia

1. Pendahuluan

Industri pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terpenting dalam perekonomian global kontemporer. Menurut data World Travel and Tourism Council (WTTC), kontribusi sektor Travel & Tourism terhadap PDB global mencapai USD 10,9 triliun pada tahun 2024, merepresentasikan 10% ekonomi dunia dan menyerap 357 juta tenaga kerja (WTTC, 2024). Hubungan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi subjek kajian intensif selama dua dekade terakhir, dengan berbagai studi yang secara konsisten mendemonstrasikan kontribusi positif sektor pariwisata terhadap ekonomi negara-negara penerima wisatawan (Alcalá-Ordóñez et al., 2024; Brida et al., 2016).

Dalam konteks ini, kebijakan visa memainkan peran krusial sebagai instrumen regulasi yang mempengaruhi arus pariwisata internasional. Kebijakan visa bukan sekadar dokumen perjalanan, melainkan alat strategis yang digunakan negara untuk mengendalikan dan mengelola pariwisata, mempengaruhi ekonomi, dan memproyeksikan agenda politik mereka (Artal-tur et al., 2016; Czaika & Neumayer, 2017). Studi empiris menunjukkan bahwa pemberlakuan persyaratan visa menurunkan pergerakan pariwisata internasional, terutama di negara-negara maju, meskipun

efeknya bervariasi tergantung jenis visa yang diterapkan (Lawson & Roychoudhury, 2016; Chi et al., 2022).

Jepang muncul sebagai studi kasus yang menarik dalam konteks ini. Negara ini berhasil menerima 36,87 juta wisatawan asing pada tahun 2024—rekor tertinggi sepanjang sejarah—dengan tingkat pelanggaran overstay yang nyaris nol, yakni hanya 0,2% dari total kedatangan (Japan Immigration Services Agency, 2024). Pencapaian ini kontras dengan pengalaman Indonesia yang pasca-liberalisasi visa 2016 justru mengalami peningkatan pelanggaran imigrasi sebesar 176% dalam dua tahun (Azizurrohman et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mekanisme keberhasilan Jepang dalam menyeimbangkan keterbukaan pariwisata dengan ketertiban imigrasi; (2) mengevaluasi dampak ekonomi pariwisata Jepang melalui lensa multiplier effect; dan (3) mengidentifikasi pembelajaran yang dapat diadopsi Indonesia dalam reformasi kebijakan pariwisatanya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi: Tourism-Led Growth Hypothesis

Hipotesis pertumbuhan berbasis pariwisata (Tourism-Led Growth Hypothesis/TLGH) telah menjadi kerangka teoritis dominan dalam memahami hubungan antara pariwisata dan pembangunan ekonomi. Sejak kemunculannya di awal abad ini, TLGH telah diuji secara empiris di berbagai negara dengan menggunakan beragam indikator untuk menganalisis variabel terkait pariwisata dan ekonomi (Brida et al., 2016; Antonakakis et al., 2015).

Pentingnya mempertimbangkan dampak arus wisatawan terhadap penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung menjadi krusial mengingat multiplier effect sektor pariwisata yang mempengaruhi sektor-sektor lain dalam perekonomian (Gao et al., 2021; Badimo & Yuhuan, 2024). Solarin et al. (2024) dalam studinya yang dipublikasikan di *Journal of Travel Research* menemukan bahwa diversifikasi pasar dan aktivitas pariwisata memberikan multiplier effect terhadap tingkat permintaan barang dan jasa di berbagai industri seperti pertanian, transportasi, kesehatan, hiburan, informasi, dan komunikasi.

2.2 Multiplier Effect dalam Ekonomi Pariwisata

Konsep multiplier effect, yang pertama kali dipopulerkan oleh Paul Samuelson, menjelaskan bagaimana setiap unit mata uang yang dibelanjakan wisatawan tidak berhenti di satu tempat tetapi mengalir, berputar, dan menciptakan dampak berlipat dalam perekonomian (Miller & Blair, 2009). Menurut kalkulasi OECD dan Mastercard Economics Institute, setiap 100 unit mata uang yang dibelanjakan turis menciptakan tambahan aktivitas ekonomi yang signifikan melalui efek langsung, tidak langsung, dan induksi (OECD, 2024).

Studi terkini oleh Santana-Gallego & Paniagua (2022) mengkonfirmasi bahwa pariwisata internasional menciptakan keterkaitan yang kuat dengan perdagangan internasional dan migrasi. Sementara itu, penelitian Wang et al. (2022) yang dipublikasikan di *SN Business & Economics*

mendemonstrasikan keterkaitan dinamis antara pariwisata outbound, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional menggunakan data empiris dari China.

2.3 Kebijakan Visa dan Dampaknya terhadap Pariwisata

Kebijakan visa telah lama diakui sebagai salah satu formalitas administratif terpenting yang mempengaruhi arus pariwisata internasional. Gu (2024) dalam studinya yang dipublikasikan di *SAGE Open* menganalisis efek kebijakan bebas visa terhadap pariwisata inbound, dengan temuan bahwa kebijakan bebas visa merupakan "pedang bermata dua" yang memerlukan pertimbangan spillover spasial dalam evaluasinya.

Penelitian struktural oleh Lawson & Roychoudhury (2016) menggunakan gravity model menunjukkan bahwa pemberlakuan visa tradisional memberikan dampak lebih besar dibandingkan visa elektronik yang lebih fleksibel. Studi ini menganalisis pergerakan pariwisata global dari 194 negara asal ke 163 destinasi selama periode 2016-2021. Czaika & Neumayer (2017) dalam *Applied Geography* menambahkan bahwa restriksi visa secara signifikan menghambat globalisasi ekonomi melalui penurunan mobilitas internasional.

2.4 Kontrol Biometrik dan Keamanan Perbatasan

Penggunaan teknologi biometrik dalam kontrol perbatasan telah berkembang pesat, memberikan pendekatan yang lebih cepat, aman, dan efisien untuk verifikasi identitas pelancong (Ivlevs & Smith, 2024). Di pos pemeriksaan imigrasi, teknologi biometrik memberdayakan otoritas perbatasan untuk memverifikasi identitas penumpang dengan cepat dan akurat, membantu mengidentifikasi potensi ancaman dan mencegah masuknya individu tanpa izin (National Immigration Forum, 2022).

Studi oleh Janta & Ladkin (2024) dalam *Tourism Review* menganalisis konsekuensi ketenagakerjaan dari COVID-19 terhadap pekerja migran di sektor pariwisata dan hospitality, yang memiliki implikasi terhadap kebijakan imigrasi dan mobilitas tenaga kerja internasional.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis komparatif kualitatif berbasis data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari Japan Immigration Services Agency (2024), Japan Tourism Agency (2024), World Travel and Tourism Council Economic Impact Research (2024), dan Badan Pusat Statistik Indonesia. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal bereputasi Q1 dan Q2 yang dipublikasikan dalam empat tahun terakhir (2021-2024).

Analisis dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator kunci antara Jepang dan Indonesia, meliputi: (1) jumlah kedatangan wisatawan; (2) kontribusi ekonomi pariwisata; (3) tingkat pelanggaran imigrasi; (4) sistem penegakan hukum; dan (5) infrastruktur teknologi. Framework analisis mengadopsi model Input-Output yang telah digunakan secara luas dalam mengkaji dampak ekonomi pariwisata (Klijs & Maris, 2012; Miller & Blair, 2009).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pariwisata sebagai Mesin Ekonomi: Kasus Jepang

Tahun 2024 menandai pemulihan penuh industri pariwisata global pasca-pandemi, dengan banyak kawasan memasuki fase pertumbuhan melampaui level pra-pandemi. Menurut UN Tourism, kedatangan wisatawan internasional global pada 2024 mencapai sekitar 1,4 miliar, setara dengan 99% level 2019, dengan total ekspor pariwisata mencapai rekor USD 1,9 triliun (Japan National Tourism Organization, 2024).

Jepang muncul sebagai salah satu destinasi terpopuler bagi wisatawan internasional, mencatatkan rekor baru kedatangan wisatawan asing. Menurut Japan National Tourism Organization (JNTO) dan Japan Tourism Agency (JTA), sekitar 36,9 juta wisatawan asing mengunjungi Jepang pada 2024, melampaui rekor sebelumnya sebesar 31,9 juta pada 2019 dengan peningkatan sekitar 15,7%.

Belanja wisatawan inbound sebesar 8,1 triliun yen (USD 53,3 miliar) menempatkan sektor ini sebagai industri ekspor terbesar kedua Jepang, hanya di bawah ekspor otomotif yang mencapai sekitar 17,7 triliun yen pada 2024 (Japan Ministry of Finance, 2024). Temuan ini mengkonfirmasi observasi historis yang dikemukakan Konosuke Matsushita, pendiri Panasonic, pada 1954 bahwa pariwisata dapat dianggap sebagai bentuk perdagangan di mana atraksi wisata tetap tidak berubah betapapun seringnya dikunjungi, berbeda dengan ekspor barang yang menghabiskan sumber daya (Matsushita, 1954 dalam *Bungei Shunju*).

Tabel 1. Kontribusi Ekonomi Pariwisata Jepang 2024

Indikator	Nilai	Perubahan dari 2019
Kedatangan Wisatawan	36,87 juta	+15,7%
Belanja Wisatawan Inbound	¥8,1 triliun	+16%
Kontribusi ke PDB	¥44,6 triliun	+5,7%
Tenaga Kerja	6,13 juta	+209.700
Persentase PDB	7,5%	-

Sumber: WTTC Economic Impact Research (2024); Japan Tourism Agency (2024)

4.2 Multiplier Effect: Dari Semangkuk Ramen hingga Ekonomi Nasional

Mekanisme multiplier effect dalam pariwisata Jepang dapat diilustrasikan melalui rantai nilai yang tercipta dari satu transaksi sederhana. Ketika seorang wisatawan menikmati ramen di kedai kecil di Tokyo, uang yang dibayarkan mengalir ke pemilik kedai, yang kemudian membeli mie dari pabrik di Sapporo, daging dari peternak di Kagoshima, dan sayuran dari petani di Nagano. Pabrik mie membayar karyawannya, yang kemudian berbelanja di supermarket lokal, dan seterusnya (Miller & Blair, 2009).

Penelitian terkini oleh Wibowo & Ichihashi (2022) dalam *Journal of Economic Structures* menganalisis kontribusi ekonomi berbasis pariwisata di Tokyo Metropolitan menggunakan model Input-Output dua-region. Studi tersebut menemukan bahwa di dalam Tokyo, keterkaitan sektoral pariwisata domestik dalam hal output, pendapatan, dan nilai tambah signifikan pada sektor keuangan dan asuransi, perdagangan, jasa personal lainnya, serta pendidikan dan penelitian. Sementara untuk pariwisata inbound, hotel, restoran, dan perdagangan menjadi tiga sektor yang paling terdampak.

Dalam hal penciptaan lapangan kerja, sejumlah signifikan pekerjaan diinduksi oleh pengeluaran pengunjung domestik melalui sektor perdagangan (44.644 pekerjaan) dan sektor restoran (43.262 pekerjaan). Untuk pengeluaran pengunjung inbound, sektor restoran menciptakan 4.749 pekerjaan dan sektor hotel menciptakan 4.180 pekerjaan (Wibowo & Ichihashi, 2022).

Berdasarkan kalkulasi OECD, setiap 100 yen yang dibelanjakan turis di Jepang menciptakan tambahan aktivitas ekonomi senilai 80 yen. Dengan demikian, belanja turis senilai 8,1 triliun yen sebenarnya menggerakkan roda ekonomi senilai hampir 15 triliun yen (OECD, 2024). Inilah yang menjadikan pariwisata disebut sebagai "industri tanpa cerobong asap"—menggerakkan petani, pengrajin, sopir taksi, hingga penjual oleh-oleh, tanpa perlu membangun pabrik yang mengotori udara.

4.3 Tenaga Kerja Pariwisata: Peluang dan Tantangan

Data WTTC Economic Impact Research (2024) menunjukkan bahwa 6,13 juta orang di Jepang bekerja di sektor yang terkait pariwisata. Ini berarti satu dari setiap dua belas pekerja di negara tersebut—baik resepsionis hotel, koki restoran, masinis kereta, atau pemandu wisata—hidupnya bergantung pada kedatangan turis asing.

Distribusi tenaga kerja ini mencerminkan struktur industri pariwisata yang kompleks. Sektor makanan dan minuman menyerap lebih dari 3 juta pekerja, transportasi mempekerjakan hampir 900 ribu orang, dan akomodasi sekitar 650 ribu. Sisanya tersebar di agen perjalanan, toko oleh-oleh, dan ribuan usaha pendukung lainnya.

Namun, keberhasilan ini menciptakan paradoks tersendiri. Studi oleh Feist (2024) dalam ILO Working Paper mengidentifikasi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan sebagai penyebab utama kekurangan tenaga kerja di ekonomi maju. Di Jepang, tingkat kekosongan posisi di industri hospitality mencapai 4,4%—jauh di atas rata-rata nasional (Japan Ministry of Health, Labour and Welfare, 2024).

Survei American Hotel & Lodging Association (2024) yang mengkaji kondisi global hospitality menemukan bahwa 67% hotel masih mengalami kekurangan staf, dengan 12% menyatakan kekurangan tersebut "parah". Kondisi serupa terjadi di Jepang, di mana sekitar 150 ribu pekerja asing meninggalkan industri hospitality selama pandemi dan tidak kunjung kembali.

Merespons tantangan ini, Pemerintah Jepang membuka visa khusus bagi pekerja asing di sektor akomodasi. Program Specified Skilled Worker (SSW) yang diluncurkan 2019 telah diperluas

menjadi 16 industri pada 2024, termasuk sektor hospitality, dengan menawarkan masa tinggal lebih panjang, mobilitas kerja, dan jalur menuju residensi permanen (Japan Immigration Services Agency, 2024).

4.4 Rahasia di Balik Angka 0,2%: Sistem Kontrol Imigrasi Jepang

Pertanyaan krusial yang muncul adalah: bagaimana Jepang bisa menerima 36 juta turis dengan tingkat pelanggaran nyaris nol? Analisis terhadap kebijakan dan praktik imigrasi Jepang mengidentifikasi empat faktor kunci yang bekerja secara simultan.

Pertama, sistem sanksi yang jelas dan terukur. Immigration Control and Refugee Recognition Act (ICRRA) Jepang menetapkan bahwa overstay bukan pelanggaran ringan. Pasal 70 ICRRA memberikan sanksi hingga tiga tahun penjara dan/atau denda hingga 3 juta yen (sekitar Rp315 juta) untuk pelanggaran terkait imigrasi termasuk masuk ilegal dan overstay (Global Detention Project, 2024).

Yang lebih strategis adalah sistem insentif yang mendorong pelaporan diri. Berdasarkan *Shukkou Meirei Seido* (Sistem Perintah Keberangkatan), overstayer yang menyerahkan diri sebelum ditangkap hanya mendapat larangan masuk kembali selama satu tahun. Sebaliknya, jika tertangkap, larangan masuk menjadi lima hingga sepuluh tahun (Japan Immigration Services Agency, 2024). Sistem ini secara efektif mendorong overstayer untuk "bertobat" sendiri, menghemat biaya operasi penangkapan yang mahal.

Kedua, penegakan hukum yang konsisten. Data menunjukkan deportasi melonjak 67% pada 2023 dan 135% pada 2024—mencapai 18.908 orang, dengan 90% di antaranya adalah kasus overstay (Japan Times, 2024). Pada Mei 2025, pemerintah meluncurkan "Zero Illegal Immigrants Plan" untuk mempercepat deportasi. Deportasi dengan biaya pemerintah pada kuartal ketiga 2025 naik dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Asahi Shimbun, 2025).

Ketiga, integrasi teknologi biometrik. Sejak 2007, Jepang mewajibkan pengambilan sidik jari dan foto wajah untuk semua wisatawan asing. Sistem biometrik ini terintegrasi dengan database kepolisian, memungkinkan pelacakan real-time dan identifikasi cepat terhadap para pelanggar (National Immigration Forum, 2022).

Penelitian terkini tentang penggunaan teknologi facial recognition untuk kontrol perbatasan dan perjalanan menunjukkan bahwa teknologi biometrik memungkinkan otoritas perbatasan memverifikasi identitas penumpang dengan cepat dan akurat, membantu mengidentifikasi potensi ancaman dan mencegah masuknya individu tanpa izin (HID Global, 2025).

Keempat, budaya kepatuhan. Faktor ini lebih sulit ditiru karena bersifat sosio-kultural. Masyarakat Jepang—dan wisatawan yang berkunjung—cenderung menghormati aturan. Namun, budaya ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit; ia terbentuk dari sistem yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten selama puluhan tahun.

Hasilnya signifikan: jumlah overstayer di Jepang turun dari puncak 300 ribu pada 1993 menjadi hanya 71 ribu pada 2025—pengurangan lebih dari 75% dalam tiga dekade (Japan Immigration Services Agency, 2024).

4.5 Analisis Biaya-Manfaat: Rasio 743 Banding 1

Kalkulasi komparatif antara manfaat ekonomi dan biaya penanganan pelanggaran imigrasi menghasilkan rasio yang mengejutkan. Dari sisi manfaat, ekonomi pariwisata Jepang pada 2024 mencatatkan belanja turis sebesar 8,1 triliun yen yang kemudian berputar dalam perekonomian melalui multiplier effect senilai 6,5 triliun yen. Secara keseluruhan, kontribusi sektor ini terhadap PDB mencapai 44,6 triliun yen sekaligus menyerap 6,13 juta tenaga kerja di berbagai lini industri pendukung pariwisata.

Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan untuk menangani permasalahan overstay relatif kecil. Dengan sekitar 19 ribu deportasi dan estimasi biaya 500 ribu yen per orang, total pengeluaran deportasi mencapai sekitar 9,5 miliar yen. Ditambah dengan biaya penegakan hukum dan monitoring yang diperkirakan sekitar 50 miliar yen, total biaya penanganan overstay berkisar pada angka 60 miliar yen per tahun.

Perbandingan kedua angka tersebut menghasilkan rasio manfaat-biaya sebesar 743 banding 1. Artinya, untuk setiap satu yen yang dihabiskan menangani masalah overstay, Jepang memperoleh 743 yen dari pariwisata. Return on investment yang luar biasa tinggi ini mengkonfirmasi bahwa investasi dalam sistem kontrol imigrasi yang efektif memberikan hasil yang jauh melampaui biayanya, sekaligus mematahkan asumsi bahwa keterbukaan dan ketertiban adalah dua hal yang saling bertentangan.

4.6 Kasus Indonesia: Liberalisasi Tanpa Sistem Pendukung

Pengalaman Indonesia menawarkan kontras yang instruktif. Pasca-liberalisasi visa 2016 yang membuka pintu bagi 169 negara, pelanggaran imigrasi justru melonjak 176% dalam dua tahun (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018). Data terkini dari Azizurrohmah et al. (2024) yang dipublikasikan dalam *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events* menemukan bahwa kebijakan bebas visa Indonesia menunjukkan efek negatif terhadap kedatangan turis dalam jangka panjang.

Studi tersebut menggunakan augmented gravity model yang menggabungkan variabel ekonomi, geografis, dan kebijakan. Temuan kunci menunjukkan bahwa sementara PDB Indonesia dan negara asal secara positif mempengaruhi kedatangan wisatawan, kebijakan bebas visa secara tidak terduga menunjukkan efek negatif, kemungkinan besar karena tantangan dalam mengelola kualitas pengunjung dan mempertahankan daya tarik destinasi (Azizurrohmah et al., 2024).

Penelitian Antariksa (2024) dalam jurnal *Aspirasi* mengkaji secara kritis kebijakan bebas visa Indonesia, menemukan bahwa kebijakan ini telah menuai pro dan kontra sejak diimplementasikan pada 2016. Kebijakan bebas visa memudahkan warga negara asing untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia tanpa menyadari dampak negatif yang dibawa orang-orang tersebut. Sejak

kebijakan ini diimplementasikan, kasus-kasus seperti penyalahgunaan izin tinggal dan overstay meningkat signifikan.

Tabel 2. Perbandingan Indikator Pariwisata Jepang dan Indonesia

Indikator	Jepang (2024)	Indonesia (2019*)
Wisatawan Asing	36,87 juta	16 juta
Devisa Pariwisata	¥8,1 T (~USD 53,3 M)	~USD 20 M
Tingkat Overstay	0,2%	Data tidak tersedia
Kontribusi ke PDB	7,5%	~5%
Sistem Biometrik	Komprehensif sejak 2007	Parsial

*Data pra-pandemi sebagai baseline

Studi oleh Gu (2024) dalam *SAGE Open* menegaskan bahwa kebijakan bebas visa adalah "pedang bermata dua". Liberalisasi tanpa sistem pendukung yang memadai justru bisa kontraproduktif. Chi et al. (2022) dalam penelitiannya menggunakan teknik propensity score matching menemukan bahwa kedatangan wisatawan internasional tidak serta-merta meningkat ketika jumlah negara bebas visa bertambah dalam jangka panjang, kecuali ada perencanaan kebijakan pariwisata yang komprehensif.

4.7 Implikasi Kebijakan: Menuju "Pintu yang Lebih Cerdas"

Analisis komparatif ini menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk Indonesia:

Pertama, reformasi sistem sanksi. Indonesia perlu membangun sistem insentif yang mendorong kepatuhan sukarela, seperti yang diterapkan Jepang melalui perbedaan konsekuensi antara pelaporan diri dan penangkapan.

Kedua, konsistensi penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten menciptakan persepsi bahwa aturan hanya "tulisan di atas kertas". Peningkatan kapasitas dan komitmen dalam deportasi dan penanganan pelanggaran menjadi krusial.

Ketiga, investasi teknologi biometrik. Implementasi sistem biometrik terintegrasi yang menghubungkan pos imigrasi dengan database kepolisian dan interpol menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia telah mulai mengimplementasikan automated border control (ABC) gate di beberapa titik seperti Pelabuhan Batam Center, namun perlu diperluas secara nasional (HID Global, 2025).

Keempat, seleksi negara bebas visa berbasis kriteria objektif. Penelitian Antariksa (2024) merekomendasikan agar kriteria seleksi kebijakan bebas visa harus transparan untuk memastikan pencapaian manfaat ekonomi yang diharapkan. Faktor-faktor di luar pendapatan per kapita, seperti tingkat demokrasi dan pengeluaran pariwisata, perlu dipertimbangkan.

5. Kesimpulan

Studi ini mendemonstrasikan bahwa keberhasilan Jepang dalam menyeimbangkan keterbukaan pariwisata dengan ketertiban imigrasi bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari sistem terintegrasi yang mencakup sanksi terukur, penegakan konsisten, teknologi biometrik, dan budaya kepatuhan yang terbentuk selama puluhan tahun. Dengan rasio manfaat-biaya 743:1, investasi Jepang dalam sistem kontrol imigrasi yang efektif terbukti memberikan return yang luar biasa tinggi.

Pengalaman Indonesia pasca-liberalisasi visa 2016 mengkonfirmasi temuan literatur bahwa liberalisasi visa tanpa sistem pendukung yang memadai bersifat kontraproduktif. Peningkatan pelanggaran imigrasi 176% dalam dua tahun dan efek negatif terhadap kedatangan turis jangka panjang menjadi bukti empiris yang tidak dapat diabaikan.

Jepang mengajarkan bahwa keterbukaan dan ketertiban bukan dua hal yang bertentangan. Dengan sistem yang tepat, keduanya bisa berjalan beriringan. Yang dibutuhkan Indonesia bukan pintu yang lebih ketat atau lebih longgar—melainkan pintu yang lebih cerdas, dengan engsel teknologi, kunci biometrik, dan penjaga yang konsisten menegakkan aturan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam implementasi sistem biometrik di pos-pos imigrasi Indonesia, serta melakukan analisis kuantitatif tentang hubungan kausal antara konsistensi penegakan hukum dan tingkat kepatuhan wisatawan.

Daftar Pustaka

- Alcalá-Ordóñez, A., Hervás-Gómez, C., & Romero-Padilla, Y. (2024). Tourism-economic growth nexus: A comprehensive meta-analysis. *Tourism Management*, 100, 104821. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104821>
- Antonakakis, N., Dragouni, M., & Filis, G. (2015). How strong is the linkage between tourism and economic growth in Europe? *Economic Modelling*, 44, 142-155. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.018>
- Antariksa, B. (2024). Towards advanced tourism development in Indonesia: A critical review of free-visa policy. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 15(1), 1-18. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i1.3822>
- Artal-Tur, A., Pallardó-López, V. J., & Requena-Silvente, F. (2016). Examining the impact of visa restrictions on international tourist flows using panel data. *Estudios de Economía*, 43(2), 265-279.
- Azizurrohman, M., Sugiharti, L., Yamauchi, C., & Purwono, R. (2024). Attracting tourists to Indonesia: How SEZs and visa-free policies influence international arrivals. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*. <https://doi.org/10.1080/19407963.2024.2432634>

Badimo, S., & Yuhuan, Z. (2024). Tourism impact on local production: A systematic review. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 5(1), 100112.

Brida, J. G., Cortes-Jimenez, I., & Pulina, M. (2016). Has the tourism-led growth hypothesis been validated? A literature review. *Current Issues in Tourism*, 19(5), 394-430.
<https://doi.org/10.1080/13683500.2013.868414>

Chi, C., Chi, J., & Chua, B. (2022). Impact of tourist visa exemption on international tourist arrivals to OECD countries. *Tourism Analysis*, 27(3), 285-300.

Czaika, M., & Neumayer, E. (2017). Visa restrictions and economic globalization. *Applied Geography*, 84, 75-82. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.04.011>

Feist, L. (2024). Imbalances between supply and demand: Recent causes of labour shortages in advanced economies (ILO Working Paper No. 115). International Labour Organization.

Gao, Y., Su, W., & Wang, K. (2021). Does high-speed rail boost tourism growth? New evidence from China. *Tourism Management*, 83, 104233.

Global Detention Project. (2024). Japan immigration detention profile.
<https://www.globaldetentionproject.org/countries/asia-pacific/japan>

Gu, J. (2024). Does the visa-free policy promote inbound tourism? Evidence from China. *SAGE Open*, 14(2). <https://doi.org/10.1177/21582440241261676>

HID Global. (2025). Facial recognition for border control and travel: 2025 trends and insights.
<https://blog.hidglobal.com/facial-recognition-border-control-and-travel-2025-trends-and-insights>

Ivlevs, A., & Smith, I. (2024). Do international tourist arrivals change residents' attitudes towards immigration? A longitudinal study of 28 European countries. *Tourism Economics*, 30(1), 104-131. <https://doi.org/10.1177/13548166221137950>

Janta, H., & Ladkin, A. (2024). The labour consequences of Covid-19: Migrant workers in tourism and hospitality. *Tourism Review*, 79(2), 266-270.

Japan Immigration Services Agency. (2024). 2024 Immigration control and residency management. Ministry of Justice, Japan.

Japan National Tourism Organization. (2024). Tourism statistics: Visitor arrivals to Japan.

Japan Tourism Agency. (2024). White paper on tourism in Japan, 2024. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.

Klijs, J., & Maris, D. K. (2012). Regional input-output modeling for tourism impact analysis. *Spatial Economic Analysis*, 7(1), 119-138.

Lawson, C., & Roychoudhury, S. (2016). Do visa policies matter for tourist flows? A panel data analysis. *Journal of Policy Modeling*, 38(6), 1016-1031.

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-output analysis: Foundations and extensions* (2nd ed.). Cambridge University Press.

National Immigration Forum. (2022). Biometrics at the border.
<https://forumtogether.org/article/biometrics-at-the-border/>

OECD. (2024). Estimating the global economic impacts of international tourism. OECD Science, Technology and Industry Working Papers.

Santana-Gallego, M., & Paniagua, J. (2022). Gravity models for tourism demand modeling: Empirical review and outlook. *Journal of Economic Surveys*, 36(5), 1358-1409.

Solarin, S. A., Ulucak, R., & Erdogan, S. (2024). Assessing the economic impacts of tourism markets and activities diversification: Evidence from a new dynamic regression approach. *Journal of Travel Research*, 63(1), 179-201. <https://doi.org/10.1177/00472875231203395>

Wang, C. M., Pan, S. L., Morrison, A. M., & Wu, T. P. (2022). The dynamic linkages among outbound tourism, economic growth, and international trade: Empirical evidence from China. *SN Business & Economics*, 2(11), 1-18.

Wibowo, K. A., & Ichihashi, M. (2022). Tourism-led economic contribution, interregional repercussion effects, and intersectoral propagation activities in Tokyo Metropolitan. *Journal of Economic Structures*, 11, Article 21. <https://doi.org/10.1186/s40008-022-00278-4>

World Travel and Tourism Council. (2024). Japan: 2024 economic impact research.
<https://wttc.org/research/economic-impact>